

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia, Bandung: Nusa Media, 2017.
- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Budi Setiawan, “Studi Standar Elektronik dan Keandalan dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik”, *Puslitbang Aplikasi Informasi dan Informasi Komunikasi Publik*, 2014.
- Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, 1999.
- Dhanang Widijawan, E-Logistic Contract Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Malfunction, Keamanan Siber dan Data Pribadi, Bandung: CV Keni Media, 2017.
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Cetakan 1, Edisi 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2018.
- Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Cet. II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Information Security Committee, Section of Science & Technology - American Bar Association, Digital Signature Guidelines, United States: American Bar Association, 2016.
- Julien ESNAULT, *Mémoire: la signature électronique*, (Université de Paris II Panthéon-Assas, Paris, Année universitaire, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, “Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (Cyber Law) di Indonesia”, Medan: Pidato Purna Bhakti, 2001.
- Raida L. Tobing, “Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Laporan Akhir, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010
- Rinaldi, Munir. *Matematika Diskrit Edisi Ketiga*. Bandung, Indonesia: Informatika, 2005.
- Nanda Amalia, Hukum Perikatan, Lhokseumawe: Unimal Press, 2013.
- Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, Teori dan Praktik Penelusuran Informasi (Informasi Retrieval), Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Putri Visky Saruji dan Nyoman A. Martana, “Kekuatan Hukum Pembuktian Tanda Tangan pada Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata.” Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktik Notaris*, Buku I, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2002.
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No. 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No.4843)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No 2016 Tahun 251, Tambahan Lembaran Negara No. 5952)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No. 1 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara No. 6905)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara No. 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4432)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara No. 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5491)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No. 189 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara No. 5348)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara No 185 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara No. 6400)

Jurnal

- N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi, Nomor 10.34.III,
- R. La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal Of Financial Economics*, 1 Januari 2000. DOI:10.1016/s0304-405x(00)00065-9
- Trihastuti Yuniati, Muhammad Fajar sidiq, *Legalisasi Dokumen Elektronik*, <http://www.jurnal.iaai.or.id/index.php/RESTI/article/view/2502>

Website

PT Privy Identitas Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika, <https://tte.kominfo.go.id/organizer/5db52248e2467517f4493afb>.

Qur'ani, Hamalatul. "Tanda Tangan Elektronik: Keabsahan Dan Pembuktiannya Di Hadapan Pengadilan." *Hukumonline.Com*. Last modified August 9, 2018. Accessed June 17, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tanda-tangan-elektronik--keabsahan-dan-pembuktiannya-di-hadapan-pengadilan-lt5b6b977f75137?page=3>.

Verified Identity for All (VIDA), "Membandingkan Keunggulan Tanda Tangan Elektronik Dengan Tanda Tangan Basah", diakses 11 Juli 2024, <https://www.vida.id/post/membandingkan-keunggulan-tanda-tangan-elektronik-dengan-tanda-tandan-basah>

Widarsha, *Bupati bondowoso polisikan Warga Yang palsukan Tanda Tangannya* (detiknews, 2019), diakses 11 Juli 2024, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4604018/bupati-bondowoso-polisikan-warga-yang-palsukan-tanda-tangannya>

